

ANALISIS ISI DAN TEORI FRAMING PADA PENGUMUMAN WORK FROM HOME OLEH GUBERNUR PRAMONO ANUNG BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Aldi Destian Satya¹, Fauzan Widyarman², Edison Bonar Tua Hutapea³

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: aldi.satya@students.paramadina.ac.id

Email: fauzan.widyarman@students.paramadina.ac.id; edison.bonartua@paramadina.ac.id

ABSTRACT

This study examines the Work From Home policy for State Civil Apparatus (ASN) of the DKI Jakarta Provincial Government by Governor Pramono Anung. This policy from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB) is examined through two communication theories: content analysis and framing, with its impact on ASN and the public in DKI Jakarta. The findings indicate that this announcement has an impact on the provision of important information and its relationship to energy efficiency, as the purpose of WFH. This study found that Governor Pramono Anung's method of conveying information is clear and in line with Kemenpan RB policy.

Keywords: Work From Home, Governor of DKI Jakarta, State Civil Apparatus (ASN) of DKI Jakarta.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur Pramono Anung. Kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ini dikaji melalui dua teori komunikasi yaitu analisis isi (content analysis) dan framing dengan dampaknya bagi ASN dan masyarakat di DKI Jakarta. Temuan menunjukkan bahwa melalui pengumuman ini berdampak bagi pemenuhan informasi yang penting dan hubungannya dengan efisiensi energi sebagaimana tujuan adanya WFH. Penelitian ini menemukan cara Gubernur Pramono Anung menyampaikan informasi jelas dan sejalan dengan kebijakan Kemenpan RB.

Kata kunci: Work From Home, Gubernur DKI Jakarta, ASN Pemprov DKI Jakarta.

PENDAHULUAN

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara diawali dari arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 13 Maret 2026 dan Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Sabtu, 28 Maret 2026. Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tanggal 15 Maret 2026, serta hasil Rapat Koordinasi Terbatas tanggal 23 Maret 2026 dan 28 Maret 2026, memandang perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah. Rapat ini kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi terbatas tingkat Menteri. Pada hari Senin, 30 Maret 2026 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

Surat Edaran tersebut bertujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan kedinasan di lingkungan Instansi Pemerintah melalui pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital agar mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Selanjutnya kebijakan ini juga berorientasi dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih bijak dan lebih efektif guna menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang. Surat Edaran tersebut berlaku bagi instansi Pemerintah,

baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kemudian pada hari Selasa, 31 Maret 2026 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Surat Edaran ini merujuk pada Surat Edaran Menpan RB yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Surat Edaran tersebut mulai berlaku sejak 1 April 2026. Kebijakan utama yang disebutkan dalam Surat Edaran ini, yaitu pemberlakuan WFH bagi ASN Pemerintah Daerah setiap hari Jumat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pengumuman terkait Surat Edaran tersebut secara daring dari Korea Selatan pada Selasa, 31 Maret 2026. Airlangga menyampaikan bahwa terdapat pengecualian pada sektor publik yang berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat yaitu kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan yang tidak termasuk dalam kebijakan WFH ini.

Pada tingkat pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) kebijakan ini telah dilaksanakan melalui pengumuman Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung kepada media massa pada hari Rabu, 1 April 2026. Pramono menyatakan bahwa kebijakan WFH mengikuti instruksi dari Pusat (Kemendagri), yaitu pada hari Jumat dan tetap meneruskan kebijakan sebelumnya untuk penggunaan transportasi publik pada hari Rabu. Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3/SE.2026 tanggal 6 April 2026 yang mengatur kebijakan WFH pada tingkat Pemprov DKI Jakarta. Sebagai kepala daerah, Gubernur tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai komunikator publik yang menjelaskan arah kebijakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pesan mengenai WFH dikonstruksi dan disampaikan kepada publik serta bagaimana media mbingkai informasi tersebut. Penelitian ini mengkaji pengumuman WFH menggunakan pendekatan analisis isi dan teori framing untuk memahami struktur pesan, strategi komunikasi, serta konstruksi realitas yang dibangun dalam pemberitaan media.

METODE

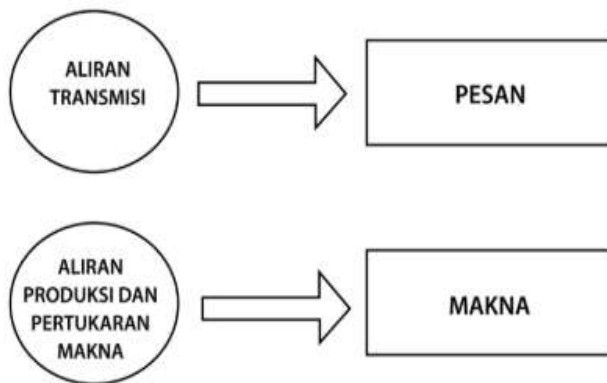
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) dan analisis framing. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami makna, struktur pesan, serta konstruksi realitas yang dibangun dalam komunikasi kebijakan Work From Home (WFH) yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Objek penelitian adalah pengumuman kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung dalam media briefing tanggal 1 April 2026. Analisis dilakukan terhadap isi komunikasi yang terekam dalam video pemberitaan media daring Warta Kota Production dan BeritaSatu, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan implementasi WFH, yaitu Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ Tahun 2026, dan Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 3/SE/2026. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa transkrip pernyataan Gubernur Pramono Anung dalam pengumuman kebijakan WFH yang dipublikasikan melalui media daring. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, surat edaran, artikel ilmiah, buku, serta literatur yang relevan dengan komunikasi pemerintahan, analisis isi, dan teori framing.

Teknik analisis data dilakukan melalui dua tahap. Pertama, analisis isi untuk mengidentifikasi tema, struktur pesan, dan pola komunikasi. Kedua, analisis framing model Entman untuk mengidentifikasi konstruksi realitas yang dibangun dalam pengumuman WFH. Kedua teori dasar komunikasi tersebut menjadi hal yang fundamental dalam menganalisa informasi yang disampaikan agar dapat dipahami. Teori ini membantu dalam memahami bagaimana pesan dikirim, diterima, ditafsirkan, dan akhirnya berdampak pada orang lain. Dalam komunikasi tidak hanya kata-kata yang berperan, tetapi bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan kondisi juga berperan penting dalam membentuk makna dari sebuah pesan. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi secara mendalam dalam menganalisis isi pesan komunikasi kebijakan Work From Home (WFH) yang

disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta mengkaji konstruksi framing yang digunakan dalam membangun legitimasi kebijakan, menjaga citra pemerintahan, dan membentuk persepsi publik terhadap implementasi kebijakan WFH. Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isi pesan dan konstruksi framing dalam komunikasi kebijakan WFH yang disampaikan kepada publik.

PEMBAHASAN

Pada pembahasan penelitian ini akan digunakan Analisis Isi (Content Analysis) terhadap penyampaian pesan Gubernur kepada publik dan penggunaan teori framing dalam menjawab isu WFH yang berkembang. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara kuantitatif, objektif, dan sistematis dari isi komunikasi (Berelson, 1954). Analisis isi juga dapat berupa teknik yang sistematis untuk mengurai isi dan mengolah pesan dan dipandang sebagai alat untuk mengamati dan mengurai tindak komunikasi yang terbuka dari komunikator terpilih (Budd dkk., 1967).



Pesan adalah apa yang terlihat (dapat dibaca, didengar, dirasakan). Sedangkan makna adalah yang tersirat (tidak bisa diterima secara langsung). Perasaan yang diterima setelah menerima pesan disebut sebagai makna (Eriyanto, 2015). Adapun analisis isi terdiri atas lima elemen sebagai berikut :

1. Objektif
2. Sistematis
3. Replikabel
4. Tampak (Manifes)
5. Perangkuman

Adapun pembahasan mengenai kelima elemen tersebut sebagai berikut:

1. Objektif

Hasil dari analisis isi harus mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan sebagai subjektivitas. Ada dua hal yang terkait dengan objektivitas yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas adalah kesesuaian dengan yang akan diukur. Sementara reliabilitas adalah hasil pengukuran tetap sama ketika diukur oleh orang lain. Adapun dalam video pengumuman WFH oleh Gubernur dapat dilihat bahwa channel media Warta Kota Production tidak menambah subjektivitas terhadap Gubernur. Judul dan narasi pada video tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Gubernur, tidak terdapat opini dari media yang menilai kebijakan yang disampaikan Gubernur tersebut.

Narasi yang disampaikan dalam video menunjukkan bahwa Gubernur mengumumkan WFH bagi ASN Pemprov DKI Jakarta setiap hari Jumat dengan pengecualian petugas Pemadam Kebakaran dan kesehatan. Untuk menguji reliabilitasnya, terdapat beberapa channel media lainnya seperti Metrotvnews, kompascom, dan detikcom dengan pemberitaan yang sama. Dalam hal objektivitas yang diukur melalui validitas dan reliabilitas maka channel Warta Kota Production sudah menerapkan objektivitas.

2. Sistematis

Sistematis adalah semua tahapan dapat dilaksanakan secara jelas (Riffe dkk., 1998 : 20). Adapun rumusan masalah pada penelitian yaitu pola komunikasi dan konsistensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan melalui SE Kemendagri. Berdasarkan pemberitaan melalui video tersebut, Warta Kota Production sudah menyajikan berita sesuai dengan informasi oleh Gubernur kepada masyarakat. Durasi video selama 4 menit 1 detik menunjukkan inti pesan yang sesuai dengan judul meskipun ada pesan lain yang disampaikan oleh Gubernur (selain WFH) yaitu hibah dan peringatan HUT ke 500 Jakarta.

Pengumuman yang disampaikan oleh Gubernur sesuai dengan isi SE Kemendagri. Dalam video terdengar seorang wartawan yang bertanya kepada Gubernur terkait SE tersebut dan dijawab “kita mengikuti” oleh Gubernur. Jawaban yang diberikan Gubernur adalah jawaban yang langsung kepada inti pertanyaan (to the point). Gubernur menegaskan bahwa SE Kemendagri harus diikuti oleh Pemprov DKI Jakarta.

3. Replikabel

Replikabel ditunjukkan dengan kesamaan hasil analisis apabila dilakukan oleh peneliti, waktu, dan konteks yang berbeda (Neuendorf, 2002 : 12). Penyampaian Gubernur dilakukan dengan singkat dan jelas sehingga publik punya kesempatan untuk memahami pesan yang disampaikan, namun belum dapat membandingkan sejauh mana kesamaan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dengan SE Kemendagri. Hal ini karena Gubernur tidak membahas isi SE Kemendagri yang akan diikuti oleh Pemprov DKI Jakarta. Penyampaian ini terlihat jelas sampai akhir video baik yang diunggah oleh Warta Kota Production sama dengan media lainnya. Untuk itu jika direplikasi maka terdapat kesamaan informasi saat Gubernur menyampaikan pengumuman WFH.

4. Tampak (Manifest)

Terdapat perbedaan pandangan pada kalangan ahli tentang manifest yaitu apakah hanya melihat yang tampak (manifest) atau melihat yang tampak sekaligus tidak tampak (latent). Namun Riffe, Lacy, dan Fico (1998: 30) mengambil pilihan di antara keduanya yaitu pada saat pengumpulan data, hanya dapat dinilai yang tampak. Namun pada saat pengolahan data, dapat melibatkan aspek yang tidak tampak.

Pada pengumuman WFH oleh Gubernur, situasi yang tampak adalah Gubernur akan melaksanakan SE Kemendagri secara keseluruhan. Penyampaian ini memastikan bahwa ASN Pemprov DKI Jakarta akan menjalani kebijakan yang sama dengan ASN di seluruh Indonesia yang sudah terikat dengan SE Kemendagri. Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan kebijakan dari Kemendagri kepada Pemprov DKI Jakarta.

Adapun yang tidak tampak bagi masyarakat adalah SE Kemendagri tersebut tidak hanya mengatur tentang WFH bagi ASN, melainkan terdapat poin lainnya yang mengatur penghematan energi dan tidak adanya kebijakan WFH bagi pejabat tertentu. Dari tayangan pada video Warta Kota Production tidak ada pembahasan terkait poin selain WFH tersebut. Oleh karena itu apabila dilihat dari yang tidak tampak maka terdapat informasi yang belum lengkap terkait isi SE Kemendagri saat disampaikan oleh Gubernur kepada masyarakat.

5. Perangkuman

Analisis isi dibuat untuk melakukan perangkuman (generalizing) dari sebuah pesan (Neuendorf, 2002 : 15). Penyampaian Gubernur dalam video tersebut menghasilkan informasi yang jelas dan masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan tersebut awalnya berasal dari SE Kemendagri. Oleh karena itu kesimpulannya masyarakat dapat memahami bahwa Gubernur menjalankan SE Kemendagri bagi ASN Pemprov DKI Jakarta.

Namun demikian setelah dilakukan analisis mengenai aspek yang tampak dan tidak tampak seperti yang telah dibahas sebelumnya, ternyata masyarakat tidak menerima informasi SE Kemendagri secara keseluruhan, melainkan hanya kebijakan WFH saja. Dalam hal ini pemberitaan WFH dipublikasikan oleh Warta Kota Production karena kebijakan ini yang paling penting disampaikan kepada masyarakat di dalam SE tersebut. Sementara bagian dari SE yang mengatur penghematan energi dan pejabat yang tidak melaksanakan WFH umumnya tidak tersampaikan.

Dengan adanya lima aspek di atas, dapat diketahui bahwa penyampaian Gubernur terhadap SE Kemendagri memberikan inti pesan yang jelas dan penting bagi masyarakat. Dampak dari penyampaian tersebut yaitu kebutuhan informasi masyarakat khususnya WFH bagi ASN Pemprov DKI Jakarta menjadi terpenuhi.

Dari kelima aspek yang telah dibahas sebelumnya, kemudian dikembangkan untuk dianalisis isinya dalam menggambarkan suatu pesan. Analisis isi digunakan untuk menjawab pesan melalui ‘what, to whom, and how’ dari suatu proses komunikasi (Holsti, 1969:28).

Analisis Isi dari Sumber yang Sama dalam Waktu yang Berbeda

Analisis isi dapat menunjukkan bagaimana pesan tersampaikan dari kesamaan sumber pesan namun pada waktu yang berbeda. Pada penyampaian Gubernur terhadap SE Kemendagri, Gubernur sebagai penyampai pesan (komunikator) menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan penting dan ditunggu masyarakat khususnya ASN Pemprov DKI Jakarta. Meskipun demikian dalam struktur pemerintahan tidak ada kewajiban Gubernur untuk menyampaikan pesan secara langsung kepada publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, fungsi komunikasi publik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov DKI Jakarta. Fungsi ini yang dijalankan Gubernur ketika menyampaikan kebijakan WFH, namun sumber informasi yang terdapat pada Pemprov DKI Jakarta tidak harus berasal dari Gubernur. Artinya penyampaian informasi dimungkinkan dari tokoh lain yang berada dalam Pemprov (misalnya Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, atau pejabat lainnya) selama tidak ada perbedaan isi informasi.

Jika dilihat dari waktu yang berbeda, tetap terdapat kesamaan isi pesan karena sumber pesan tidak bergantung pada orang yang sama (Gubernur), melainkan siapa saja yang dapat mewakili Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat tidak hanya percaya ketika diumumkan oleh Gubernur tetapi tetap dapat memahami isi pesan jika diumumkan oleh selain Gubernur baik pada kesempatan itu maupun pada kesempatan lainnya karena sumber pesan adalah instansi (Pemprov DKI Jakarta).

Analisis Isi Melihat Pesan pada Situasi yang Berbeda

Dari video yang dipublikasikan oleh Warta Kota Production dapat dilihat bahwa situasi pada saat penyampaian informasi adalah pertemuan Gubernur dengan media massa. Situasi ini menunjukkan Gubernur menyampaikan informasi agar cepat diketahui oleh masyarakat melalui berbagai media massa. Isi informasi akan tetap sama dengan situasi yang berbeda karena informasi yang disampaikan berasal dari sumber yang valid (SE Kemendagri). Tidak terdapat penambahan ataupun perubahan dari sumber informasi sehingga Gubernur menyatakan “akan mengikuti” kebijakan tersebut. Pernyataan Gubernur yang kemudian akan diproses oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menerbitkan SE bagi ASN di lingkungannya.

Analisis Isi Menyampaikan Pesan pada Khalayak yang Berbeda

Penelitian yang dilakukan Kolbe dan Albanese (1996) merujuk kepada penampilan laki-laki pada majalah dengan segmen pembaca yang berbeda. Dengan segmen pembaca yang berbeda maka tampilan laki-laki yang terdapat pada majalah tersebut juga berbeda. Dalam hal penyampaian Gubernur, Warta Kota Production mengambil informasi yang sama dengan seluruh media di waktu yang bersamaan. Hasilnya informasi yang diperoleh sama, hanya terdapat perbedaan sudut pandang karena posisi kamera media saat mengambil video Gubernur.

Adapun khalayak yang menjadi penerima informasi (komunikasi) adalah masyarakat umum, dengan melihat bahwa kebijakan WFH yang diumumkan Gubernur kepada ASN maka masyarakat yang paling terdampak informasi tersebut adalah ASN Pemprov DKI Jakarta. Khalayak lain yang terdampak adalah masyarakat DKI Jakarta yang bukan berprofesi sebagai ASN, sedangkan masyarakat yang berada selain di DKI Jakarta bukan termasuk masyarakat yang terdampak meskipun video berita Warta Kota Production dapat disaksikan di seluruh Indonesia.

Analisis Isi Melihat Pesan dari Komunikator yang Berbeda

Pada analisis ini dilakukan untuk menilai komunikator yang berbeda menyampaikan pesan yang berbeda dari kasus yang sama. Dalam hal video penyampaian kebijakan WFH oleh Gubernur, tidak terdapat komunikator lain yang ada pada video Warta Kota Production. Komunikator hanya berasal dari Gubernur meskipun pada saat penyampaian didampingi oleh Wakil Gubernur dan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Gubernur sebagai Kepala Daerah melaksanakan penyampaian pesan secara langsung kepada media massa sehingga menguatkan isi pesan.

Secara aturan tidak menutup kemungkinan terdapat komunikator lain di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menambah isi pesan kepada masyarakat pada kesempatan berbeda. Seperti telah dibahas sebelumnya, terdapat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov DKI Jakarta yang secara aturan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

91

Indexed



SINTA 4



dapat memperjelas atau menyampaikan informasi terbaru apabila terdapat perubahan pada SE Gubernur sebagaimana pernyataan Gubernur yang akan menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui SE Gubernur.

Analisis isi kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengapa pesan muncul dalam bentuk tertentu (Eriyanto : 2015). Analisis ini berupa hubungan sebab-akibat dari perubahan yang terjadi. Analisis isi melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat akibat penyampaian informasi kebijakan WFH oleh Gubernur.

Perubahan pola kerja ASN Pemprov DKI Jakarta menunjukkan adanya pengaruh langsung dari SE Gubernur yang berlaku sejak Jumat, 10 April 2026. Oleh karena itu tidak terdapat kebingungan dari informasi yang disampaikan oleh Gubernur.

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam menganalisis isi, yaitu: deskriptif, eksplanatif, dan prediktif (Riffe, Lacy, dan Fico: 1998). Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dibahas sebagai berikut :

1. Deskriptif

Pendekatan deskriptif melihat suatu pesan yang disampaikan secara detail sesuai dengan aspek dan karakteristik pesan (Eriyanto: 2015). Dalam video penyampaian kebijakan WFH tersebut, Gubernur menunjukkan bahwa kebijakan yang terdapat pada SE Kementerian Dalam Negeri ternyata sudah banyak diketahui masyarakat. Sehingga ketika media massa menanyakan kebijakan tersebut, Gubernur yang juga sudah mengetahui bahwa SE tersebut diterbitkan sehari sebelumnya, tidak lagi menjelaskan isi SE. Ini sangat berbeda dengan kebijakan yang belum diketahui masyarakat luas namun penting sehingga akan dijelaskan terlebih dahulu isi dan tujuannya.

Kemudian dari penyampaiannya Gubernur memposisikan sebagai pihak yang menjalankan SE tersebut karena kebijakan ASN Pemprov DKI Jakarta datang dari Gubernur. Tanpa penyampaian oleh Gubernur, ASN Pemprov DKI Jakarta tidak dapat menjalankan SE Kemendagri karena belum dijelaskan oleh pimpinannya.

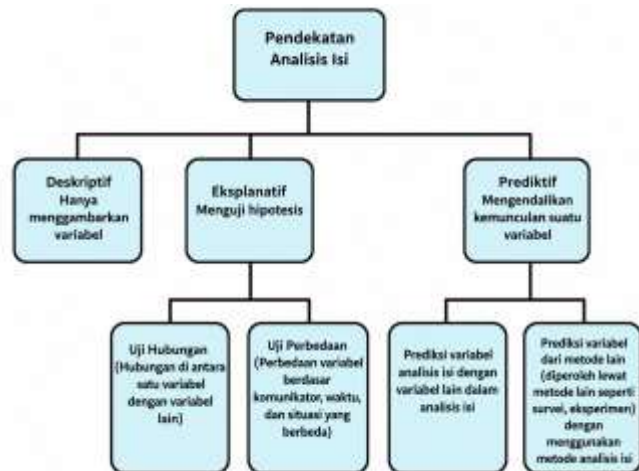
2. Eksplanatif

Eksplanatif dilakukan ketika ada pengujian terhadap hipotesis tertentu. Dalam Rumusan Masalah ke 1 telah disebutkan struktur, pola bahasa, dan strategi komunikasi Gubernur dalam menyampaikan kebijakan WFH. Dalam video tersebut penyampaian ini bukan khusus untuk WFH saja, tetapi ada topik lainnya yang dibahas yaitu hibah dan HUT ke 500 Jakarta. Secara bahasa Gubernur menyampaikan pesan yang dapat dipahami dengan jelas, tidak menimbulkan ambigu dan multitafsir, juga tampak menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan berasal dari dirinya. Hal ini penting untuk ditunjukkan karena apabila kebijakan WFH berasal dari dirinya, maka dia akan sangat perlu menjawab kritik dari masyarakat terkait efektivitas kebijakan WFH ini.

Tetapi karena kebijakan ini berasal dari SE Kemendagri, posisi Gubernur tinggal melaksanakan saja. Jika publik mengkritisi efektivitas WFH ini, tentunya publik akan menuju ke Kemendagri. Posisi ini menunjukkan Gubernur bukan sebagai penanggung jawab kebijakan melainkan penanggung jawab berlakunya kebijakan tersebut di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

3. Prediktif

Analisis isi berupaya untuk memprediksi hasil seperti diuji dengan variabel lain (Neuendorf, 2002:55). Melalui analisis isi penyampaian kebijakan WFH oleh Gubernur, kebijakan ini mendapatkan reaksi bagi ASN Pemprov DKI Jakarta ataupun masyarakat. Reaksi bagi ASN adalah



berlakunya kebijakan SE Kemendagri di lingkungannya. Sementara bagi masyarakat, kebijakan ini dilihat sebagai perubahan pola kerja ASN (dengan pengecualian yang diatur dalam SE).

Ketika kebijakan WFH ini diumumkan oleh Gubernur, masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan yang diatur SE Kemendagri telah diberlakukan secara konsisten oleh Pemprov DKI Jakarta. Konsistensi ini menjadi penting karena apabila kebijakan Gubernur terdapat sedikit saja perbedaan maka masyarakat dapat Pemprov DKI Jakarta tidak mengikuti aturan dari atasnya (pusat). Kemudian jika dibandingkan apabila penyampaian kebijakan WFH ini bukan oleh Gubernur, masyarakat tetap dapat memahami apabila disampaikan dengan konteks yang jelas bahwa Pemprov DKI Jakarta mematuhi SE Kemendagri.

Asumsi teori kedua dalam komunikasi yang disampaikan oleh Gubernur menggunakan Framing Theory. Dalam hal ini, penyampaian Gubernur merujuk pada SE Kemendagri yang ditindaklanjuti pada tingkat Daerah. Framing Theory menjadi satu asumsi dalam gaya bicara Gubernur yang hendaknya menekankan kepada maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut seperti keamanan publik, efisiensi layanan, atau risiko kesehatan. Konsep analisis framing pertama kali diperkenalkan oleh Erving Goffman pada tahun 1974 melalui karyanya yang berjudul *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Dalam karya tersebut, Goffman mengemukakan bahwa individu tidak memaknai realitas secara langsung, melainkan melalui suatu kerangka interpretatif (frame) yang membantu mereka memahami dan mengorganisasikan pengalaman sehari-hari.

Analisis framing dalam konteks ini, dipahami sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana suatu peristiwa atau realitas dikonstruksi melalui prinsip-prinsip tertentu yang mengatur cara penyajian dan pemaknaannya. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai struktur kognitif yang memungkinkan individu untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menafsirkan berbagai peristiwa yang mereka alami. Dengan demikian, realitas yang dipahami oleh individu pada dasarnya merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kerangka interpretatif tersebut. Lebih lanjut Goffman menekankan bahwa keterlibatan subjektif individu memiliki peran penting dalam proses framing. Artinya, pengalaman, latar belakang, serta perspektif personal seseorang turut memengaruhi bagaimana suatu peristiwa dimaknai. Oleh karena itu, analisis framing tidak hanya berfokus pada struktur penyajian suatu peristiwa, tetapi juga memperhatikan bagaimana individu sebagai subjek secara aktif membangun makna terhadap realitas yang dihadapi. Dalam perkembangannya, konsep ini kemudian banyak digunakan dalam kajian media dan komunikasi untuk menganalisis bagaimana pesan, khususnya dalam media massa, dibingkai sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi persepsi dan interpretasi khalayak. Dengan demikian, analisis framing menjadi alat penting untuk memahami bahwa penyajian informasi tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan nilai, kepentingan, dan sudut pandang tertentu.

Secara keseluruhan, analisis framing menegaskan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang bersifat objektif semata, melainkan dibentuk melalui proses interpretasi yang terstruktur, baik oleh individu maupun oleh institusi yang memproduksi informasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap framing menjadi krusial dalam upaya mengkaji bagaimana makna dibentuk, disampaikan, dan diterima dalam kehidupan sosial. Seperti yang diketahui bahwa media berperan penting dalam memberikan informasi kepada publik. Di mana isu WFH bagi ASN menjadi hal yang sangat menarik di tengah perbincangan krisis bahan bakar yang melanda. Sehingga sebagai langkah strategis pemerintah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan memperkuat ketahanan energi, maka dilakukan WFH.

Sementara itu, framing theory digunakan untuk menganalisis bagaimana media menyelesaikan, menekankan, dan mengkonstruksi realitas tertentu, guna membentuk interpretasi, persepsi, dan opini khalayak. Kemudian, framing theory juga dapat menjadi alasan bagaimana pemerintah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta mengelola persepsi publik, membangun citra positif lembaga, dan menonjolkan aspek tertentu dari kebijakan agar lebih mudah diterima masyarakat. Argumentasi penggunaan teori framing juga didasari kebijakan pemerintah seringkali dikemas dengan mengarahkan pada pencitraan. Seperti halnya pandangan Entaman, konsep framing menyediakan cara “The Power of a Communication Text” di mana framing pada dasarnya mengacu pada pemberitaan definisi, penjelasan,

penilaian, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan suasana tertentu dari peristiwa yang dibahas.

Kaitannya dalam kebijakan WFH, pemerintah menerjemahkan kebijakan WFH adalah solusi dari penyelesaian masalah yang terjadi atas efisiensi bahan bakar dengan dikemas melalui Surat Edaran Menpan RB tentang Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri. kemudian diturunkan melalui Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 3/SE/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja melalui Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kemudian, dapat dilihat juga melalui pemberitaan pada Warta Kota Production yang memberikan judul berita “WFH ASN di DKI Jakarta Dimulai 1 April 2026, Petugas Damkar hingga Tenaga Kesehatan Tetap Bertugas” yang mana pada penyampaian Gubernur terdapat 3 hal utama. Sementara, judul yang disampaikan oleh media hanya poin kebijakan WFH saja. Sehingga framing yang dibangun media hanya kepada poin pelaksanaan WFH. Begitu juga pada komunikasi yang disampaikan Gubernur tidak menjelaskan secara detail kebijakan WFH bagi ASN di Pemprov DKI Jakarta.

Pada dasarnya WFH saat ini berbeda kondisinya dengan WFH yang dilakukan saat pandemi. WFH saat pandemi berorientasi kepada kesehatan, namun WFH saat ini berorientasi kepada penghematan energi dan bahan bakar dari dampak geopolitik timur tengah. Namun, disamping itu pula transformasi digital menjadi suatu keniscayaan harus dilakukan dalam menghadapi tantangan zaman. WFH bukan sesuatu hal yang baru lagi di sebagian instansi pemerintah telah menerapkan WFH sejak 2023 pasca pandemi. WFH menjadi suatu fenomena yang semakin meluas didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan WFH menjadi krusial dikarenakan bukan hanya terkait kehadiran absensi, tetapi kebijakan ini harus mencakup aspek-aspek yang jelas seperti jadwal kerja, alat komunikasi yang efektif, dan berbasis kinerja. Transformasi budaya kerja baru dari konvensional menjadi digital, harus memperhatikan kesiapan infrastruktur digital. Dengan demikian, ASN dituntut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

ASN merupakan pelayan publik yang digaji dari pajak rakyat, maka rakyat pun memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrol kinerja ASN. Sehingga WFH ini tidak berganti menjadi Work From Anywhere (WFA). Apabila itu terjadi, maka tidak tercapai tujuan dari kebijakan ini, yang pada dasarnya untuk penghematan bahan bakar. Dalam melakukan kebijakan tersebut, harus ada monitoring dan evaluasi secara berkala. Kemudian, harus ada alat ukur output dan outcome yang tidak hanya berbasis kehadiran atau HP aktif ada di rumah. Kebijakan ini harus didukung dengan memastikan tidak ada layanan publik yang terkendala. Adapun manfaat dari WFH selain penghematan biaya dan keberlanjutan, ada juga terhadap isu lingkungan. WFH membantu mengurangi mengurangi kemacetan dengan menekan mobilitas ASN dan penggunaan fasilitas kantor. Namun, disamping itu ada beberapa kekurangan WFH, diantaranya: Kesulitan dalam koordinasi dan komunikasi antar anggota tim. Absennya interaksi langsung di kantor dapat mempengaruhi aliran informasi dan kolaborasi; WFH memiliki kecenderungan dalam memisahkan batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi, yang menyebabkan kerja tidak mendapatkan hasil optimal.

Berdasarkan dampak tersebut, maka kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan WFH menjadi sorotan yang penting diamati. Penyampaian Gubernur terkait WFH memberikan informasi lebih kepada masyarakat dalam pelaksanaan teknis SE tersebut dan menjawab keresahan yang ada. Ada beberapa hal yang disampaikan Gubernur yang menjadi hal menarik, di antaranya:

1. Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah Pusat, yang mengatur WFH setiap hari Jumat dan menambahkan kebijakan untuk melakukan penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu.
2. Tidak semua ASN yang dapat melakukan WFH, pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa, seperti: Pejabat Madya dan Pratama, Dinas Kesehatan, Damkar, dan lainnya. Hanya yang berkaitan dengan administrasi yang akan diatur
3. Pemerintah DKI Jakarta akan mengatur proporsi ASN dengan ranges 25-50%

Penjelasan Gubernur terkait WFH mengarah langsung kepada inti yang akan dilakukan oleh Pengprov DKI Jakarta, namun belum secara teknis menjelaskan mekanisme kerja ASN dan keseluruhan isi SE terkait. Poin yang disampaikan oleh Gubernur dapat ditangkap langsung oleh masyarakat merupakan langkah yang rasional dan strategis. Gubernur menjawab secara implisit dua isu besar: (1) efisiensi BBM di tengah kondisi fisik dan energi nasional yang menantang, serta (2) reformasi tata kelola pemerintahan menuju model yang lebih modern dan berbasis kinerja. Dengan pengaturan ketat proporsi 25-50%, sanksi tegas, dan pengecualian pelayanan publik, maka diharapkan risiko penurunan kinerja dapat diminimalisir.

Kemudian, saat sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan berkaitan ASN yang melakukan Work From Cafe dan dijawab, “pasti akan ada sanksi, tindakan tegas untuk itu”. Bagian ini menjadi suatu framing yang dilakukan Gubernur dalam membangun citra positif untuk memperlihatkan disiplin dan ketegasan Pengprov menjalankan kebijakan WFH. Namun, ketika ditanyakan kembali sanksinya apa, ada dugaan kemungkinan Gubernur belum memiliki jawaban karena saat menjawab tatapan mata melihat ke atas dan terjadi jeda beberapa saat. Kemudian, di akhir berkata, “pokoknya sanksi, kalau perlu dibina, dibinasakan” sambil mengakhiri Media briefing tersebut.

Oleh karena itu, meskipun informasi yang disampaikan oleh Purnomo dalam menanggapi kebijakan WFH di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum cukup mendetail kepada persoalan teknis. Namun, secara garis besar Pramono telah menginformasikan terkait penggunaan transportasi umum di setiap hari rabu dan beberapa layanan publik yang terus berjalan tanpa adanya WFH serta pengaturan proporsinya yang di mana Gubernur memberikan diskresinya dalam mengatur ranges ASN yang WFH dan WFO. Warta Kota Production dan BeritaSatu juga merupakan media digital yang sangat berpengaruh dalam menyampaikan informasi kepada publik. Judul yang dibingkai langsung mengarah kepada inti yang disampaikan oleh Parmono. Meskipun pada Warta Kota Production tidak mengambil cuplikan sampai akhir sesi, namun dinarasikan intinya oleh pembawa berita. Sedangkan pada BeritaSatu mengambil keseluruhan sampai sesi diskusi selesai tanpa dinarasikan pembawa berita. Keduanya membuat judul berita dengan menonjolkan aspek implementasi WFH serta pengecualian bagi tenaga kesehatan dan petugas pemadam kebakaran. Framing tersebut mengarahkan perhatian publik pada dampak kebijakan terhadap aktivitas ASN dan pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan Gubernur berhasil mbingkai kebijakan WFH sebagai solusi yang rasional, strategis, dan tidak mengganggu pelayanan publik sehingga memperoleh legitimasi dari masyarakat dan ASN dan memberikan kepastian informasi kepada ASN dan masyarakat. Namun demikian, penyampaian yang bersifat umum menyebabkan beberapa aspek teknis belum dijelaskan secara rinci sehingga masih memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja ASN selama WFH.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman kebijakan WFH oleh Gubernur DKI Jakarta menggunakan pola komunikasi yang informatif, terstruktur, dan menekankan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Analisis isi memperlihatkan bahwa pesan utama berfokus pada implementasi WFH, keberlanjutan pelayanan publik, dan efisiensi energi dengan tujuannya menghadapi perubahan zaman dari dampak konflik geopolitik di timur tengah. Sehingga diperlukannya transformasi tata kelola budaya kerja agar dapat menekan penggunaan bahan bakar dan efisiensi energi serta tetap mengoptimalkan kinerja. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan WFH di setiap hari Jumat.

Kemudian, berdasarkan teori yang digunakan pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan utama dalam pola komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur, antara lain:

1. Gubernur menyampaikan informasi dengan pola komunikasi asertif, artinya informasi yang disampaikan secara terstruktur dijelaskan. Pada saat itu Gubernur tidak hanya menginformasikan kebijakan WFH, tetapi juga menginformasikan dua hal lainnya yang dibahas saat rapat paripurna. Meskipun informasi yang disampaikan tentang WFH di lingkungan DKI Jakarta tidak secara mendetail sampai ke tingkat teknis pelaksanaannya, tetapi di akhir penyampaiannya diberikan

- kesempatan untuk tanya jawab yang hanya berlangsung singkat. Gubernur menekankan informasi yang cukup krusial terkait WFH, yakni pelayanan publik di DKI Jakarta masih tetap berjalan.
2. Kebijakan WFH dibingkai sebagai solusi transformasi tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien. Media daring memperkuat framing tersebut dengan menonjolkan implementasi WFH sebagai isu utama dibandingkan agenda lain yang disampaikan dalam sesi media briefing. Media menjadi alat yang sangat berguna dalam menyebarkan informasi ke masyarakat. Media online pun dapat langsung memframing isi pengumuman melalui judul berita. Sehingga pemilihan judul berita sangat penting dalam merespon isi dalam sebuah informasi.
 3. Informasi yang diberikan belum seluruhnya menjawab keresahan masyarakat. Apabila dianalisis lebih lanjut pada berita tersebut, terdapat beberapa komentar yang masih menjurus kepada respon negatif. Sehingga diharapkan Gubernur dapat memberikan informasi lebih lugas dan jelas khusus untuk kebijakan WFH. Hal ini diakibatkan oleh sebagian orang merasa ada ketimpangan sosial yang terjadi antara ASN yang dibayar gajinya oleh uang rakyat disandingkan dengan karyawan swasta yang biasa yang bekerja lebih keras tanpa WFH. Warga internet masih menanggukuhkan kepercayaannya kepada ASN karena merasa sulit diatur.

Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun legitimasi kebijakan publik. Ke depan, diperlukan komunikasi yang lebih rinci mengenai aspek teknis pelaksanaan WFH agar persepsi publik terhadap kinerja ASN tetap positif dan tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Sehingga kebijakan WFH betul-betul tepat sasaran dan tidak ada misleading yang terjadi dikarenakan kurang dipahami khalayak. Kekurangan penyampaian informasi dapat berpotensi ambiguitas dalam interpretasi teknis pelaksanaan.

REFERENSI

- Eriyanto. (2015). Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Predana Media.
- Goffman, Erving (1974). Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Penguin Books.
- McQuail, D. (2011). McQuail's Mass Communication Theory (6 th). Sage.
- Neuendorf, Kimberly A. (2002) The Content Analysis Guidebook. Sage.
- Rachmat Kriyantono. Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Kencana, 2012), 232.
- Fadil Muharrom, Oriza Putri Feriyanti, & Radivan, Z. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Gelap pada Media Online CNNIndonesia.com dan Tempo.Co (Analisis Framing R Entman). Jurnal Komputer, Informasi, dan Teknologi, 5 (1), 14.
- Novianti, L. (2024). Analisis Teoritis Tren Work From home di Era Digital: Kelebihan dan Kekurangan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*. 4(1), 31-40.
- <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2434>
- <https://ikom.fisipol.unesa.ac.id/post/membingkai-citra-lembaga-mengubah-persepsi-melalui-teori-framing>